

Pembentukan Dewan
Keselamatan Transportasi
Jalan (DKTJ) pusat dan
daerah dan Unit
Penelitian/Investigasi
Kecelakaan Lalu Lintas
(UPK)

PRASYARAT PEMBENTUKAN DKTJ & UPK

1. Komitment Politik
2. Perumusan Konsep
3. Dukungan Sarana dan Prasarana
4. Dukungan Sumber Daya Manusia (SDM);
5. Dukungan Pembiayaan
6. Pelaksanaan Proyek Percontohan (Pilot Project)

KESEPAKATAN 4 MENTERI DAN KAPOLRI PADA TANGGAL 7 APRIL 2004



KESEPAKATAN BERSAMA

Dalam rangka peringatan Hari Kesehatan Sedunia ke-56 tahun 2004 dengan tema global "*Road Safety Is No Accident*" telah dilakukan suatu "Panel Diskusi" membahas tema nasional "*Keselamatan di jalan bukan suatu kebetulan*".

Dari hasil diskusi telah disepakati untuk dilakukan tindak lanjut kerjasama lintas sektor untuk mengupayakan peningkatan keselamatan di jalan, yang meliputi:

1. Pendidikan masyarakat tentang tata tertib berlalu lintas sejak usia dini.
2. Ketersediaan informasi masyarakat tentang lalu lintas jalan.
3. Peraturan perundang-undangan lalu lintas dan penegakan hukum.
4. Persyaratan prasarana jalan.
5. Persyaratan fasilitas dan perlengkapan jalan.
6. Persyaratan fasilitas kegawatdaruratan jalan.
7. Pendanaan keselamatan di jalan.

Kesepakatan tersebut diwujudkan dalam bentuk menindaklanjuti "*Rencana Aksi Keselamatan Di Jalan*", yang telah disusun.

Jakarta, 7 April 2004

Menteri Kesehatan,

Dr. ACHMAD SUJUDI

Menteri Pendidikan Nasional,

Prof. Drs. A. MALIK FADJAR, MSc

Menteri Perhubungan,

AGUM GUMELAR, MSc

Menteri Permukiman dan Prasarana Wilayah,

DR. Ir. SOENARNO, Dipl HE

Kepala Kepolisian Negara RI,

JENDERAL POLISI Drs. DA'I BACHTIAR, SH

Disaksikan :
Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat,

M. JUSUF KALLA

KOMITMENT POLITIK

■ Pemerintah Pusat:

Komitmen lintas sektoral antara instansi terkait bidang keselamatan jalan telah ditandatanganinya Kesepakatan bersama oleh 4 Menteri + 1 Kapolri yang disaksikan Menko Kesra pada tanggal 7 April Tahun 2004 bersamaam dengan peringatan Hari Kesehatan Sedunia yang pada tahun tersebut mengambil tema ‘ **Road Safety is No Accident**’

Pemerintah Daerah

- Komitment dari Pemerintah Daerah telah dimulai di beberapa daerah yaitu **Lampung**, **Jawa Tengah** dan **Jawa Timur**, ini sehubungan dengan telah dibentuknya Unit Penelitian Kecelakaan Daerah yang didanai oleh anggaran masing-masing daerah.

BEBERAPA CONTOH DEWAN KESELAMATAN TRANSPORTASI JALAN (DKTJ) DI BEBERAPA NEGARA

■ **Australia (Negara Bagian Victoria)**

- Ditangani dua pejabat setingkat menteri (Transportasi & Polisi) yang merupakan perwakilan dari beberapa menteri yang bertanggung jawab dalam peningkatan keselamatan jalan;
- Telah berhasil menurunkan jumlah kecelakaan lalu lintas secara signifikan di awal tahun 1990-an
- Sumber pendanaan dari Asuransi dan sumber-sumber lainnya.

DEWAN KESELAMATAN JALAN (DKTJ) DI FIJI

- Semua sektor publik dan swasta terwakili dalam DKJN;
- Dana berasal dari wajib pajak atas premi asuransi kend, sponsor komersil, dan hibah pemerintah dengan proporsi, 60 %, 30 % dan 10 %;
- Pelaksanaan tugas sehari-hari dibawah tanggung jawab seorang Direktur Eksekutif

DEWAN KESELAMATAN JALAN NASIONAL (DKJN) DI JEPANG

- Diketuai oleh Perdana Menteri dengan semua menteri kunci sebagai anggota;
- Terdapat dewan yang lebih rendah yang diketuai menteri atau pejabat senior;
- Disamping dewan dan sub komite, di Jepang di bawah koordinator Kantor Perdana Menteri dibentuk Kantor Kebijakan Keselamatan Jalan dengan staf yang berasal dari multi disiplin yang bertugas untuk mengkoordinir, mempromosikan dan mengawasi keselamatan dan program keselamatan jalan.

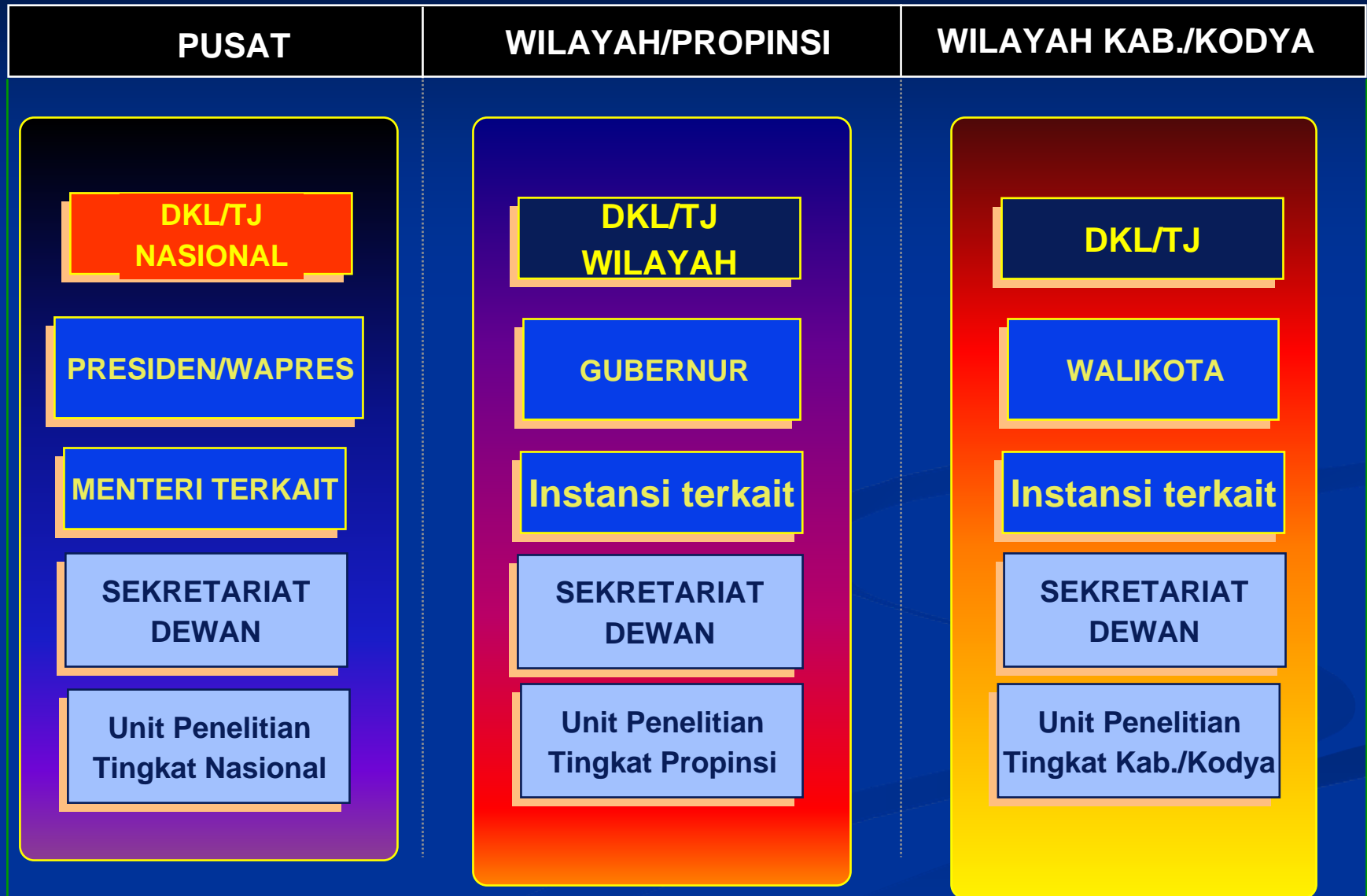
DEWAN KESELAMATAN JALAN NASIONAL (DKJN) DI THAILAND

- Komite Nasional Keselamatan Jalan didirikan oleh kantor **Perdana Menteri** Thailand yang melakukan evaluasi dan tindakan-tindakan untuk perbaikan:
 1. Kondisi kendaraan dan jalan yang buruk,
 2. Perilaku pengemudi yang tidak aman (kurang trampil atau pengaruh alkohol/obat-obatan).
 3. Mixed traffic: kendaraan besar (truk, bis) dengan proporsi besar bercampur dengan motor dan mobil
 4. Promosi ke publik melalui media massa
 5. Mengoptimalkan pendekatan tiga sektor (swasta-pemerintah-publik);
 6. Menciptakan lingkungan 'kepemilikan' diantara para mitra
 7. Pengembangan program-program TRSP

DEWAN KESELAMATAN JALAN (DKTJ) DI USA

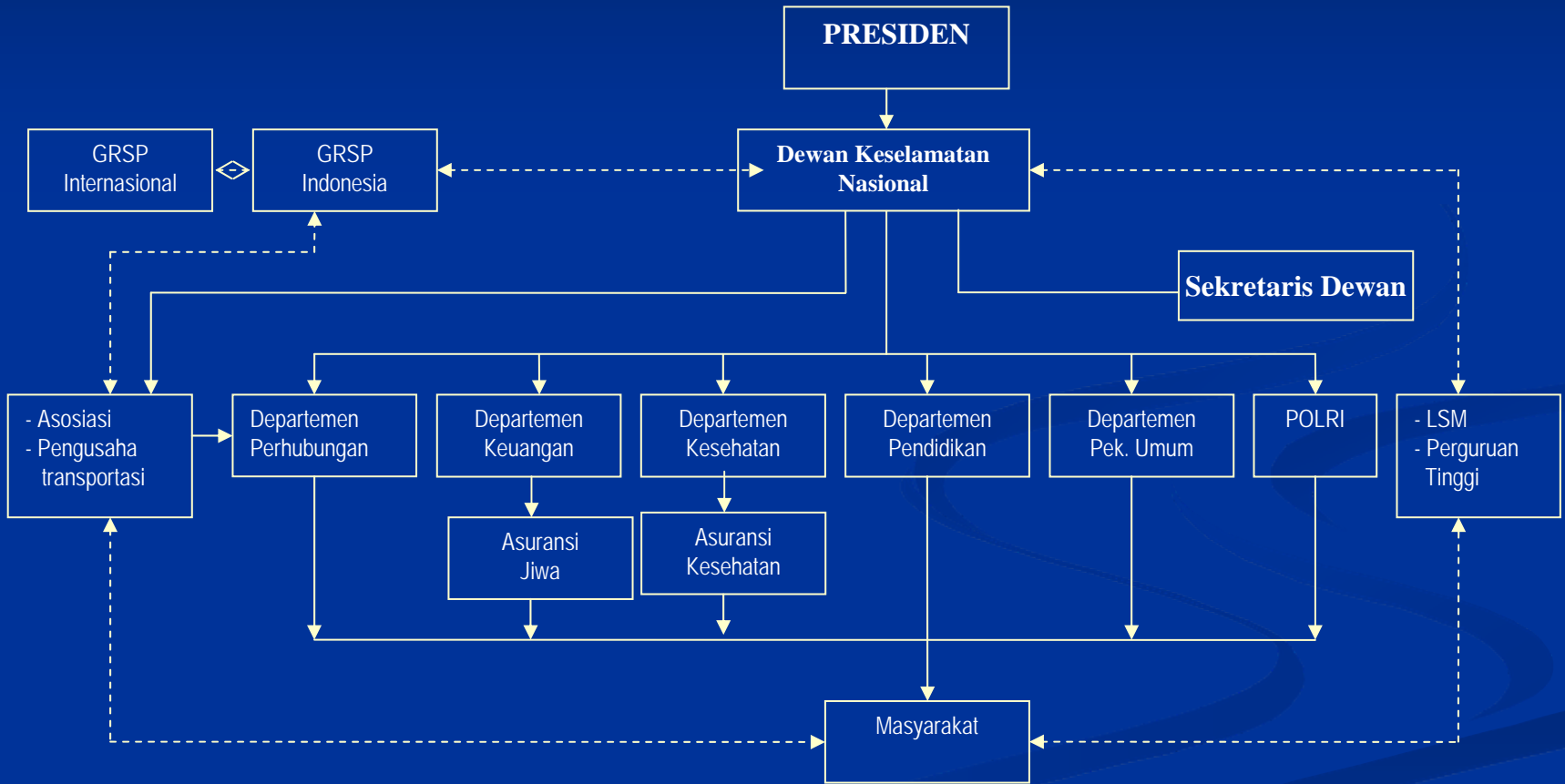
- Dikenal dengan istilah **Integrated Safety Management System (ISMS)**;
- Diketuai oleh seorang Top Management yang disebut dengan **Safety Program Leadership (SPL)**;
- SPL dapat mewakili dari Dep. Transportasi, Dinas Keselamatan Jalan State, Hukum, Kesehatan, Penerbit SIM, Pengujian KB, Pendidikan, Bappeda, Perdagangan dan Perindustrian dll.

HIERARKHI INSTITUSI DALAM MANAJEMEN KESELAMATAN LAJ



(DRAFT)

SKEMA KELEMBAGAAN DKTJN



————— FUNGSI KOMANDO
- - - - - FUNGSI KOORDINASI

KELEMBAGAAN SEKRETARIAT DEWAN



DEWAN KESELAMATAN TRANSPORTASI JALAN NASIONAL (DKTJN)

■ Tugas DKTJN

- Menetapkan cetak biru program keselamatan transportasi jalan nasional yang wajib dilaksanakan seluruh instansi;
- Menetapkan alokasi dana yang diperlukan untuk membiayai program keselamatan baik yang dialokasikan bersama atau masing-masing instansi;
- Mengkoordinasikan pelaksanaan program;
- Melakukan evaluasi dan pengawasan pelaksanaan program.

DEWAN KESELAMATAN TRANSPORTASI JALAN NASIONAL (DKTJN)

- Sebagai dewan untuk mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan keselamatan jalan pada beberapa instansi terkait sehingga kegiatan-kegiatan yang dilakukan dapat berjalan secara efektif serta dapat memberikan dampak kepada masyarakat.

DEWAN KESELAMATAN TRANSPORTASI JALAN NASIONAL (DKTJN)

- Dalam melaksanakan tugasnya DKTJN dibantu oleh sebuah sekretariat dewan yang bertugas untuk:
 - Menyiapkan dan mengkoordinasikan penyusunan cetak biru yang dibahas dalam sidang dewan;
 - Menyusun agenda dan program kerja dewan;
 - Memantau dan mengevaluasi pelaksanaan program keselamatan baik yang dilakukan oleh masing-masing instansi atau oleh dewan sendiri.

DEWAN KESELAMATAN TRANSPORTASI JALAN NASIONAL (DKTJN) di Indonesia

- Bentuk institusi yang menjadi wadah pemangku kepentingan (stake holders) dalam upaya mewujudkan keselamatan transportasi jalan yang lebih efektif;
- DKTJN dipimpin langsung oleh Presiden/Wakil Presiden dengan keanggotaan:

1. Menteri Perhubungan;

2. Kapolri;

3. Menteri PU;

4. Menteri Keuangan;

5. Menteri Kesehatan;

6. Menteri Pendidikan
Nasional;

7. Menteri Dalam Negeri;

8. Jaksa Agung;

9. Ketua Mahkamah Agung;

10. Ketua Komisi V

11. Direktur PT. Jasa Raharja

12. Ketua Asosiasi

13. DII

PEMBENTUKAN UPK

MENGAPA PERLU DIBENTUK UNIT PENELITIAN KECELAKAAN /DEWAN KESELAMATAN TRANSPORTASI JALAN (DKTJ) ?

- Pembentukannya diusulkan dalam Pasal 87 revisi UU No 14 Tahun 1992;
- Sebagai lembaga untuk mengkoordinasikan penanganan keselamatan jalan lintas sektoral;
- Beberapa negara di kawasan Asia-Pasific sudah memiliki **DKJN** seperti Australia, Fiji, Jepang, Republik Korea, New Zealand dan USA;
- Keberadaan **DKJN** pada negara-negara dimaksud telah memperlihatkan koordinasi yang efektif.

UNIT PENELITIAN KECELAKAAN (UPK)

- Sudah terbentuk di beberapa daerah yaitu :
 - **Pusat** (SK. 267/HK.601/DRJD/2002 tanggal 4 April 2002)
 - **Jawa Tengah** (SK Gubernur Jateng No. 370.05/48/2005 tanggal 22 Oktober 2005);
 - **Jawa Timur** (SK Gubernur Jatim No. 188/207/KPTS/013/2005 tanggal 4 Agustus 2005
 - **Lampung** (Keputusan Kepala Dinas Perhubungan Lampung No. 800.05 808 III.01.2002 tanggal 21 Juni 2002)
 - Keanggotaan terdiri dari Dishub Provinsi, Dinas PU Provinsi, Polda, Sekretariat Daerah (Sekda), Jasa Raharja dan instansi terkait lainnya;
 - Pelaksanaannya didanai oleh APBN dan APBD.

UNIT PENELITIAN KECELAKAAN (UPK)

- Terdiri dari Unit Investigasi Kecelakaan (UIK) dan Unit Analisis Kecelakaan (UAK);
- Unit Investigasi Kecelakaan (UIK) bertugas untuk mengadakan penelitian terhadap faktor-faktor terjadinya kecelakaan;
- Unit Analisis Kecelakaan bertugas untuk mengadakan analisis terhadap data kecelakaan yang dihasilkan oleh UIK

Beberapa Fungsi Unit Investigasi Kecelakaan (UIK)

- Melakukan penelitian kecelakaan fatal atau kecelakaan yang mengakibatkan korban meninggal dunia atau luka berat;
- Membuat laporan hasil penelitian dan usulan rekomendasi untuk mencegah terjadinya kecelakaan yang sama;
- Merekomendasikan kriteria untuk kualifikasi sebagai lokasi rawan kecelakaan dan lokasi banyak kecelakaan
- Memonitor lokasi rawan/banyak kecelakaan dalam jangka tertentu untuk memonitor tindakan yang telah dilakukan
- Dll

Beberapa Fungsi Unit Analisis Kecelakaan (UAK)

- Membentuk dan memelihara database kecelakaan lalu lintas tingkat provinsi;
- Menganalisis data dalam database;
- Membuat desain pendahuluan, perkiraan biaya dan manfaat yang diharapkan dari tindakan penanganan ;
- Menerbitkan gambaran umum statistik data kecelakaan provinsi setiap tahun;
- Dll

PERALATAN DAN PERLENGKAPAN YANG DIBUTUHKAN UPK

1. Peralatan Survey;
 - a. Automatic Traffic Counter;
 - b. Hand Tallyboards;
 - c. Radar Pengukur Kecepatan;
 - d. Video Kamera
2. Peralatan Survey Lokasi;
 - a. Roda Pengukur Jarak;
 - b. Kompas Lapangan;
 - c. Alat Pengukur Friksi
3. Peralatan Lainnya;
 - a. Kendaraan;
 - b. Komputer;
 - c. Kamera Digital
 - d. Dll

Dukungan Sumber Daya Manusia (SDM)

- Personil dalam UPK berasal dari Dinas Perhubungan, Kepolisian, Dinas PU, Bappeda (Sekda) dan Asuransi;
- Diharapkan para personil nantinya sudah memiliki pengetahuan yang baik tentang manajemen dan rekayasa lalu lintas, keselamatan jalan, analisis data kecelakaan pengetahuan tentang Sistem Informasi Kecelakaan Lalu Lintas

Dukungan Pembiayaan

- Sumber-Sumber pendanaan untuk membiayai kegiatan dalam UPK berasal dari;
 - a. APBN;
 - b. APBD;
 - c. Loan/Grant;
 - d. Sebagian dana dari SWDKLLJ
 - e. Sponsorship;
 - f. DII

SUMBER – SUMBER PENDANAAN

- **Sumber – Sumber Pendanaan Keselamatan Jalan di Luar Negeri:**
 - Peningkatan pendanaan dari anggaran pemerintah (pembangunan dan rutin);
 - Pemanfaatan dana dari sektor swasta melalui kerjasama dalam rangka peningkatan keselamatan jalan (Kemitraan dan Partnership)
 - Pemanfaatan dana dari Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan (SWDKLLJ), Mis: Fiji Dewan Keselamatan Jalan didanai 80 % dari dana Asuransi,

SUMBER PENDANAAN MELALUI PEMANFAATAN DANA DARI SWDKLJ (USULAN)

- Dana yang terkumpul dari SWDKLJ \pm 1 triliun Rupiah/tahun
- Untuk pemanfaatan dana ini telah berkoordinasi dengan Menteri Keuangan (Surat Menhub No. KU 102/1/15/ PHB 2005 tanggal 27 Januari 2005). Intinya adalah:
 - Usulan pemanfaatan dana sebesar 10-20 % atau sekitar 100 s/d 200 miliar Rupiah/tahun.

TAHAP PEMBAHASAN PEMANFAATAN DANA DARI SWDKLLJ

■ Posisi Saat Ini:

- Telah dilakukan pertemuan antara Departemen Perhubungan, Keuangan, PT. AK. Jasa Raharja dan Kepolisian yang sampai saat ini **belum diperoleh kesepakatan kemungkinan pemanfaatan dana tersebut.**

■ Tindak Lanjut:

- Perlu pembahasan kembali antara menteri Perhubungan dan Menteri Keuangan;
- Diusulkan untuk dibahas dalam sidang kabinet

Pelaksanaan Pilot Proje Pembentukan UPK

- Dalam rangka pembentukan UPK di daerah dilaksanakan melalui proyek percontohan yang didanai oleh World Bank (Sumbagut, Aceh, Sumut, Sumbar dan Riau) dan ADB (Sumbagsel: Jambi, Sumsel, Bengkulu dan Lampung);
- Ruang lingkup proyek percontohan ini yaitu pembentukan dan pengadaan sarana dan prasarana;
- Bagi daerah-daerah yang secara finansial memerlukan bantuan, akan dibantu melalui proyek perintis pembentukan Unit Penelitian Kecelakaan.

UPK SEBAGAI EMBRIO (CIKAL BAKAL) DEWAN KESELAMATAN TRANSPORTASI JALAN

- UPK yang telah terbentuk di daerah nantinya diharapkan sebagai Embrio Dewan Keselamatan Jalan (DKTJ) yang akan dibentuk baik di tingkat pusat maupun daerah;
- Pembentukan DKTJ sebagai tindak lanjut dari pelaksanaan UU No 14 yang sedang direvisi;
- DKTJ sebagai wadah untuk mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan keselamatan jalan oleh seluruh instansi terkait.



Terima kasih, mohon masukan